KONTRIBUSI PROGRAM SERTIFIKASI KAYU FSC KOPERASI WANA MANUNGGAL LESTARI TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI KTHKM SEDYO MAKMUR DI GUNUNGKIDUL

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Oleh:
Difaa Said Ramadhan
NIM 22102050010

Dosen Pembimbing:
Muhammad Izzul Haq, S.Sos, M.Sc, PhD
NIP 19810823 2009 1 007

PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman Pengesahan

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1923/Un.02/DD/PP.00.9/11/2026

Tugas Akhir dengan judul : KONTRIBUSI PROGRAM SERTIFIKASI KAYU FSC KOPERASI WANA MANUNGGAL LESTARI TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI KTHKM SEDYO MAKMUR DI GUNUNGKIDUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIFAA SAID RAMADHAN
Nomor Induk Mahasiswa : 22102050010
Telah diujikan pada : Kamis, 13 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc., PhD.
SIGNED

Valid ID: 6a8e5edb54ca7

Penguji I

Noorkamilah, S.Ag.,M.Si
SIGNED

Valid ID: 6acc7502089fd

Penguji II

Abidah Muflihati, S.Th.I., M.Si
SIGNED

Valid ID: 6abfb20bb8edf

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 6af2c8faada80

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Surat Persetujuan Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jalan Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 5158656 Fax (0274) 552230 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, mengkoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi dari saudara:

Nama : Difaa Said Ramadhan

NIM : 22102050010

Judul Skripsi : Peningkatan Kesejahteraan Petani KTHKM Sedyo Makmur melalui Program Sertifikasi FSC oleh Koperasi Wana Manunggal Lestari di Gunungkidul

Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat

- Bebas dari unsur plagiarisme
- Hasil pemeriksaan similaritas melalui Turnitin menunjukkan tingkat kemiripan sebesar 15% dengan menggunakan setelan "small match exclusion" sepuluh kata.
- Sistematika penulisan telah sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi yang berlaku.

dan dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada bidang Ilmu kesejahteraan Sosial.

Dengan ini, kami mengharap agar skripsi tersebut di atas agar segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Agustus 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi	Pembimbing
Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc., Ph.D	Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc., Ph.D
NIP. 198108232009011007	NIP. 199303192019031009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Difaa Said Ramadhan
NIM	: 22102050010
Program Studi	: Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas	: Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Peningkatan Kesejahteraan Petani KTHKM Sedyo Makmur melalui Program Sertifikasi FSC oleh Koperasi Wana Manunggal Lestari di Gunungkidul" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung unsur plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau tulisan orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Agustus 2026

Yang Menyatakan



Difaa Said Ramadhan

NIM. 22102050010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman Persembahan

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT atas izin dan karunia-Nya, dan shalawat kepada rasulnya. skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri dan untuk Ibu dan Ayah tercinta. Terimakasih atas doa yang selalu di langitkan, dukungan yang tak terhentikan, pengorbanan tanpa balas jasa, serta cinta kasih yang tiada tara.

Tumbuhku kini, semoga sesuai yang kalian impi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Motto

"Maka jangan biarkan langkahmu melemah, dan jangan biarkan hatimu berdamai dengan kemunduran, padahal cahayamu lebih tinggi. Sungguh, Tuhanmu berjalan bersamamu. selalu menjagamu, dan tak akan mengurangi sedikitpun pun dari lelah dan amalmu."

(47 : 35)

"where there is love, there is life."

(mahatma gandhi 1869-1948)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT atas karunianya sehingga telah memberi kesempatan nikmat kesehatan tiada tara sehingga penulis dapat menyelesaikan peneleitian tugas akhir dengan lancar dan baik. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh ummatnya.

Pada kesempatan ini, peneliti meminta kesempatan dengan segala ketulusan hati, untuk mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu , membimbing dan berpartisipasi dalam penulisan tugas akhir ini. Dengan selesainya penyusunan penelitian tugas akhir, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih atas ilmu yang sudah disampaikan
3. Bapak Muhammad Izzul Haq, S.Sos, M.Sc., selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih atas dukungan, dan arahannya dalam mempermudah proses penulisan skripsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Bapak Idan Ramdani, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu mengarahkan dan melancarkan di masa studi.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih atas ilmu yang disampaikan dan arahan yang bermanfaat
6. Diri sendiri, terimakasih telah bertahan sejauh ini. Terimakasih sudah menerima segala keadaan hidup. Atas keluhan dan rasa syukur, atas kesabaran yang selalu tak terukur. Semoga tetap gagah berdiri di semua kondisi.
7. Keluarga, Ibu Sri Nuryani, Bapak Agus Hambali. Semua saudara yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk tetap melanjutkan apa yang sudah dimulai.
8. Teman-teman Septa, Wildan, Nabil, Abin, Ghazal, Reihan, Izzul, Hanif, dan Arga. Terimakasih atas waktu yang terbuang dimalam hari menuju pagi. Ayak, Gheo, Salma, Dinda dan imel. Terimakasih sudah berkenan membersamai penulis, terimakasih sudah mau membuang waktu menemani penulis selama masa studi. Terimakasih atas banyak momen yang tercipta, momen suka maupun duka. Semoga harap, berisikan banyak doa cinta untuk kalian.
9. Teman-teman Ikhwah Fillah, Agus Mujahid, Hidayat Rabani, Terimakasih telah menerima penulis dengan segala kondisi. Doni Taufiq, Rakha Attalah. Terimakasih Selalu mendukung penulis agar tetap berkembang dalam segala hal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abstrak

Program sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC) merupakan salah satu upaya dalam mendorong pengelolaan hutan yang lestari sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat pengelola hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan kesejahteraan petani Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (KTHKm) Sedyo Makmur melalui program sertifikasi FSC yang difasilitasi oleh Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML) di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Informan dipilih secara purposive dari unsur pengurus dan anggota KTHKm Sedyo Makmur, Manajer KWML, serta pendamping lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis penelitian menggunakan kerangka Triple Bottom Line yang mencakup dimensi ekonomi (profit), sosial (people), dan lingkungan (planet).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program sertifikasi FSC berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani melalui beberapa perubahan. Pada dimensi ekonomi, terdapat peningkatan harga jual kayu sekitar 10 persen, tambahan harga atau premium sekitar Rp50.000–Rp100.000 per meter kubik pada kondisi tertentu, serta perluasan akses pasar hingga pasar ekspor. Biaya sertifikasi tidak dibebankan secara langsung kepada petani karena ditanggung oleh KWML, meskipun petani tetap memiliki kewajiban ekonomi berupa PSDH. Pada dimensi sosial, program mendorong penguatan kelembagaan, partisipasi melalui pertemuan rutin, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan, serta penerapan standar kesehatan dan keselamatan kerja dalam kegiatan pengelolaan hutan. Pada dimensi lingkungan, program mendorong pengelolaan hutan yang lebih terencana melalui regenerasi, penyulaman, diversifikasi tanaman, perlindungan kawasan bernilai konservasi, dan pemantauan melalui audit FSC. Meskipun demikian, manfaat program belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh anggota karena dipengaruhi oleh kemampuan produksi, waktu panen, kondisi lahan, kewajiban ekonomi, serta kapasitas masing-masing anggota. Dengan demikian, program sertifikasi FSC yang difasilitasi KWML berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan pengelolaan hutan. Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi sertifikasi perlu dipahami bersama dengan penguatan kapasitas masyarakat dan keberlanjutan sumber daya hutan.

Kata kunci: Sertifikasi FSC, Kesejahteraan Petani, KTHKm Sedyo Makmur, KWML, Triple Bottom Line.

.

Abstract

The Forest Stewardship Council (FSC) certification program is an effort to promote sustainable forest management while increasing economic and social benefits for communities managing forest resources. This study aims to analyze the improvement of farmers' welfare in the Community Forest Farmer Group (KTHKm) Sedyo Makmur through the FSC certification program facilitated by Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML) in Gunungkidul Regency. This research employed a descriptive qualitative approach with a case study design. Informants were selected purposively from the management and members of KTHKm Sedyo Makmur, the Manager of KWML, and a field facilitator. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The study employed the Triple Bottom Line framework, consisting of the economic (profit), social (people), and environmental (planet) dimensions.

The findings indicate that the FSC certification program contributes to improving farmers' welfare through several changes. In the economic dimension, timber selling prices increased by approximately 10 percent, with a premium of around IDR 50,000–100,000 per cubic meter under certain conditions, while market access expanded to international markets. Certification costs were not directly imposed on farmers because they were covered by KWML, although farmers remained responsible for economic obligations such as the Forest Resources Provision (PSDH). In the social dimension, the program strengthened farmer institutions, facilitated participation through regular meetings, improved members' capacities through training and assistance, and encouraged the implementation of occupational health and safety standards in forest management activities. In the environmental dimension, the program encouraged more systematic forest management through regeneration, replanting, crop diversification, protection of high conservation value areas, and monitoring through FSC audits. However, the benefits of the program have not been evenly experienced by all members because they are influenced by production capacity, harvesting time, land conditions, economic obligations, and individual capacities. Thus, the FSC certification program facilitated by KWML contributes to improving farmers' welfare while strengthening the economic, social, and environmental sustainability of forest management. The findings indicate that the economic benefits of certification need to be understood alongside community capacity strengthening and the sustainability of forest resources.

Keywords: FSC Certification, Farmers' Welfare, KTHKm Sedyo Makmur, Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML), Triple Bottom Line.

Daftar Isi

Halaman Pengesahan ii
Surat Persetujuan Skripsi iii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi iv
Halaman Persembahan v
Motto vi
Kata Pengantar vii
Abstrak ix
Abstract x
Daftar Isi xi
Bab I 1
Pendahuluan 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
1. Manfaat Teoritis 8
2. Manfaat Praktis 8
E. Kajian Pustaka 9
F. Kerangka Teori 17
1. Teori Triple Bottom Line 17
2. Teori Tata Kelola Hutan 22
3. Teori Kesejahteraan Petani 24
G. Metodologi Penelitian 29
1. Jenis Penelitian 29
2. Desain Penelitian 30
3. Subjek Penelitian 30
4. Objek Penelitian 31
5. Teknik Pengumpulan Data 31
6. Teknik Analisis Data 32
7. Teknik Validasi Data 34
8. Penggunaan AI *(Artificial Inteligence)* dalam Penelitian 34

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Sistematika Pembahasan 35
Bab II 37
Gambaran Umum 37
A. Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul 37
1. Kondisi Geografis Kabupaten Gunungkidul 37
2. Potensi Kehutanan Kabupaten Gunungkidul 39
B. Profil Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML) 41
1. Sejarah dan Sertifikasi KWML 41
2. Tujuan Koperasi Wana Manunggal Lestari 45
3. Struktur Organisasi KWML 46
C. Profil KTHKm Sedyo Makmur 48
1. Sejarah dan Profil KTHKm Sedyo Makmur 48
2. Keanggotaan dan Struktur Kelompok 50
3. Kemitraan KTHKm Sedyo Makmur dengan KWML 51
D. Program Sertifikasi *Forest Stewardship Council* (FSC) 52
E. Hutan Negara yang Dikelola oleh Masyarakat: Skema Perhutanan Sosial .. 54
F. Tata Kelola Hutan KTHKm Sedyo Makmur 56
1. Kejelasan Batas dan Legalitas Pengelolaan 57
2. Kesesuaian Aturan dengan Kondisi Lokal 60
3. Partisipasi Aktif dalam Pengambilan Keputusan 64
4. Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan 65
5 Transparansi dan Akuntabilitas 67
Bab III 70
Pembahasan 70
A. Keterkaitan *Triple Bottom Line* dan Indikator Kesejahteraan 70
B. Indikator Kesejahteraan dan *Triple Bottom Line* 73
1. Peningkatan Pendapatan Petani melalui Kenaikan Harga dan Akses Pasar (*profit)* 73
2. Biaya dan Kewajiban Ekonomi Petani 77
3. Perluasan Akses Pasar sebagai Bagian dari Peningkatan Pendapatan (*profit)* 79
4. Pemerataan Manfaat 83
5. Perlindungan Sosial dalam Kegiatan Pengelolaan Hutan (*people)* 85
6. Partisipasi dan Peningkatan Kapasitas Petani (*people)* 88
7. Pengelolaan pasca panen yang berkelanjutan 94

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab IV 99
Penutup 99
A. Kesimpulan 99
B. Saran 101
Daftar Pustaka 105
Lampiran 108
1. Sertifikat FSC KWML 108
2. Hasil Produksi KWML 108
3. Instrumen Penelitian 112
Hasil Cek Plagiarism 123
Daftar Riwayat Hidup 124

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab I
Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pembangunan kehutanan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan dan secara langsung bergantung pada sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosialnya. Salah satu kelompok masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan kesejahteraan adalah masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan negara.[1] Ketergantungan mereka terhadap sumber daya hutan sebagai sumber penghidupan utama sering kali tidak diiringi dengan kepastian akses, perlindungan sosial, dan peningkatan taraf hidup yang memadai. Kondisi ini menjadikan masyarakat sekitar hutan berada dalam posisi yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi, perubahan kebijakan, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya dan peluang pembangunan, sehingga isu kesejahteraan sosial menjadi sangat relevan untuk dikaji dalam konteks pengelolaan hutan.[2]

Kondisi kesejahteraan petani di Indonesia hingga saat ini masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi

[1] Midgley, James O. Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare. 1995.

[2] Suharto, Edi. "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat." Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Rafika Aditama, 2009.

Nasional (Susenas) yang dirilis oleh BPS tahun 2024, sekitar 26,80% rumah tangga di Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, namun secara umum tingkat kesejahteraan mereka masih tergolong rendah.[3] Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan kepala rumah tangga pertanian yang relatif rendah. Pada tahun 2024 sebanyak 28,48% tidak pernah bersekolah atau tidak menyelesaikan pendidikan dasar, sementara hanya 4,44% yang mencapai jenjang pendidikan perguruan tinggi.[4] Di samping itu, akses terhadap permodalan juga masih terbatas, tercermin dari rendahnya proporsi rumah tangga pertanian yang memperoleh kredit usaha, yaitu hanya sekitar 22,7%.[5] Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani belum mampu mengakses fasilitas pembiayaan yang tersedia. Secara keseluruhan, situasi tersebut menegaskan bahwa petani termasuk yang bergerak dalam sektor kehutanan rakyat masih berada dalam kondisi kerentanan multidimensional, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun akses terhadap sumber daya, sehingga diperlukan intervensi program yang terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara menyeluruh.

Dalam struktur pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, sebagian besar kawasan hutan berstatus sebagai hutan negara yang secara hukum berada di bawah penguasaan negara. Selama bertahun-tahun, pengelolaan hutan negara lebih banyak didominasi oleh pendekatan administratif dan produksi skala besar, yang cenderung

[3] Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, *Analisis Kesejahteraan Petani Tahun 2024* (Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2024), hlm. 12.

[4] Ibid., hlm. 58.

[5] Ibid., hlm. 44.

menempatkan masyarakat sekitar hutan sebagai objek kebijakan, bukan sebagai subjek pembangunan.[6] Akibatnya, manfaat ekonomi dan sosial dari pengelolaan hutan tidak terdistribusi secara merata, sementara masyarakat lokal tetap berada dalam kondisi kesejahteraan yang relatif rendah. Situasi ini memunculkan ketimpangan struktural yang berdampak langsung pada keberfungsian sosial masyarakat sekitar hutan.[7]

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengembangkan kebijakan perhutanan sosial yang memberikan akses kelola hutan negara kepada masyarakat melalui kelembagaan lokal.[8] Kebijakan ini secara normatif dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memperluas akses terhadap sumber daya, memperkuat kapasitas kelompok, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan.[9] Dalam perspektif Ilmu Kesejahteraan Sosial, perhutanan sosial dapat dipahami sebagai bentuk intervensi pembangunan berbasis komunitas yang bertujuan meningkatkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Maryudi, A., Et Al. (2012). *Shifting Forest Management Paradigms In Indonesia: From State Control To Community-Based Forest Management*. Forest Policy And Economics, 15, 63–71.

[7] Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development*, ed. ke-12 (Boston: Pearson Education, 2015), 16–18.

[8] Peraturan Menteri LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

[9] Wibowo, A., & Giessen, L. (2015). *Absolute And Relative Power Gains Among State Agencies In Forest Land Use Politics: The Ministry Of Forestry And Its Competitors In Indonesia*. Land Use Policy, 49, 131–141.

keberfungsian sosial masyarakat melalui pemberdayaan, penguatan kelembagaan, dan penciptaan peluang ekonomi yang lebih adil.[10]

Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (KTHKM) merupakan salah satu bentuk kelembagaan masyarakat yang berperan penting dalam implementasi kebijakan perhutanan sosial. KTHKM tidak hanya berfungsi sebagai unit pengelola sumber daya hutan, tetapi juga sebagai wadah sosial yang mengorganisasi anggota kelompok dalam mengakses sumber daya, membangun solidaritas sosial, dan mengelola risiko ekonomi secara kolektif. KTHKM Sedyo Makmur sebagai kelompok yang mengelola hutan pemerintah, menjalankan aktivitas pengelolaan hutan dalam kerangka regulasi negara, sekaligus menghadapi tuntutan untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan anggota kelompok dan keluarganya.

Dalam kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial, petani secara luas diakui sebagai salah satu kelompok rentan yang menghadapi berbagai bentuk kerentanan multidimensional, baik secara ekonomi, sosial, maupun struktural.[11] Kerentanan petani tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam, fluktuasi harga pasar, keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan informasi, serta posisi tawar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] Santika, T., Et Al. (2017). *Community Forest Management In Indonesia: Avoided Deforestation In The Context Of Anthropogenic And Climate Complexities*. Global Environmental Change**,** 46, 60–71.

[11] Marita, Nurul Widya, dkk., "Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Indonesia, Review Manajemen Strategis," *AGRIEKONOMIKA: Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian* 10, no. 2 (2021): 214–228,

yang lemah dalam struktur ekonomi dan kebijakan.[12] Selain itu, petani sering kali berada dalam relasi kekuasaan yang tidak seimbang dengan aktor pasar dan institusi formal, sehingga memiliki keterbatasan dalam memengaruhi keputusan yang berdampak langsung pada keberlangsungan mata pencaharian mereka. Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya perlindungan sosial, ketidakpastian penguasaan sumber daya, serta rendahnya akses terhadap layanan kesejahteraan, yang secara keseluruhan memengaruhi keberfungsian sosial petani sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitas.[13] Oleh karena itu, dalam perspektif kesejahteraan sosial, petani termasuk petani hutan yang tergabung dalam KTHKM perlu dipahami sebagai kelompok sasaran intervensi pembangunan yang memerlukan pendekatan pemberdayaan, perlindungan sosial, dan penguatan kapasitas agar mampu keluar dari situasi kerentanan yang bersifat struktural dan berkelanjutan.

Meskipun kebijakan perhutanan sosial telah memberikan akses kelola kepada masyarakat, dalam praktiknya kelompok pengelola hutan negara masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi tingkat kesejahteraan mereka. Keterbatasan akses pasar, rendahnya nilai jual hasil produksi, lemahnya posisi tawar dalam rantai nilai, serta kompleksitas regulasi sering kali membuat manfaat ekonomi yang diterima masyarakat tidak sebanding dengan tanggung jawab

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] Stephen Devereux, "Livelihood Insecurity and Social Protection: A Re-Emerging Issue in Rural Development," *Development Policy Review* 19, no. 4 (2001): 507–519.

[13] Dodik Ridho Nurrochmat et al., "The Role of Social Forestry in Poverty Reduction in Indonesia," *Forest Policy and Economics* 102 (2019): 27–37.

pengelolaan yang mereka emban.[14] Kondisi ini berdampak pada ketidakstabilan pendapatan, ketidakpastian mata pencaharian, dan kerentanan sosial ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, program sertifikasi FSC yang difasilitasi oleh Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML) hadir sebagai salah satu bentuk intervensi kelembagaan yang bertujuan memperbaiki akses kelompok terhadap sistem ekonomi formal. Sertifikasi kayu tidak hanya dimaknai sebagai upaya pemenuhan aspek legalitas, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil hutan, memperluas akses pasar, serta memperkuat posisi tawar kelompok masyarakat. Dari sudut pandang kesejahteraan sosial, sertifikasi kayu dapat dipahami sebagai instrumen yang berpotensi meningkatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan memperbaiki kondisi kesejahteraan anggota kelompok.

Namun demikian, sertifikasi kayu juga membawa konsekuensi sosial yang perlu dikaji secara kritis. Proses sertifikasi sering kali menuntut kapasitas administratif, pemahaman teknis, dan kepatuhan terhadap standar tertentu yang tidak selalu mudah dipenuhi oleh kelompok masyarakat. Tanpa pendampingan yang memadai, sertifikasi berpotensi menimbulkan beban tambahan, baik secara ekonomi maupun sosial, yang justru dapat memperlemah keberfungsian sosial kelompok. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana sertifikasi kayu

[14] Ahmad Maryudi dan Max Krott, "Forest Certification as a Political Instrument: A Case Study from Indonesia," *Forest Policy and Economics* 24 (2012)

dijalankan dalam konteks kehidupan sosial kelompok, serta bagaimana dampaknya dirasakan oleh anggota kelompok secara langsung.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program sertifikasi dan intervensi berbasis kelembagaan memiliki dampak yang beragam terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan aspek kebijakan dan ekonomi sebagai fokus utama, sementara dimensi sosial, pengalaman subjektif masyarakat, dan dinamika internal kelompok belum banyak dikaji secara mendalam. Keterbatasan ini menunjukkan adanya kebutuhan akan penelitian kualitatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama analisis kesejahteraan.

Oleh karena itu, penelitian mengenai peningkatan kesejahteraan petani KTHKM Sedyo Makmur menjadi sangat relevan dalam konteks Ilmu Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana intervensi kelembagaan memengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat pengelola hutan negara, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik pemberdayaan masyarakat yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan keberfungsian sosial.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kontribusi program sertifikasi terhadap peningkatan kesejahteraan petani KTHKM Sedyo Makmur setelah mengikuti program sertifikasi FSC oleh Koperasi Wana Manunggal Lestari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk menganalisis kontribusi program sertifikasi terhadap peningkatan kesejahteraan petani KTHKM Sedyo Makmur setelah mengikuti program sertifikasi FSC oleh Koperasi Wana Manunggal Lestari

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Ilmu Kesejahteraan Sosial, khususnya dalam kajian kesejahteraan sosial berbasis komunitas dan kelompok rentan yang mengelola sumber daya alam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan penerapan teori Triple Bottom Line dalam konteks kesejahteraan sosial masyarakat pedesaan dan petani hutan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML) dalam merancang dan menyempurnakan program pendampingan sertifikasi FSC agar lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial anggota kelompok. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi KTHKM Sedyo Makmur dan kelompok sejenis dalam memahami potensi dan tantangan sertifikasi kayu sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan. Bagi pemerintah dan pemangku kepentingan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan perhutanan sosial dan program pemberdayaan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan salah satu metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian dengan tujuan untuk memperkaya dan memperluas teori-teori yang digunakan dalam mengkaji suatu penelitian. Dalam kajian pustaka ini, peneliti akan membahas penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, untuk memperjelas posisi penelitian yang sedang dilakukan, peneliti menguraikan beberapa kajian pustaka sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Toha, Mohammad, Ake Wihadanto, dan Nurhasanah berjudul *"Dampak perhutanan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dalam mendukung kelestarian hutan di Kota Tarakan"*[15], yang dilaksanakan di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas program perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan negara, yang selama ini masih menunjukkan tingkat kemiskinan yang tinggi meskipun memiliki sumber daya hutan. Penelitian ini menggunakan indikator

[15] Toha, M., Wihadanto, A., & Nurhasanah, N. *"Dampak perhutanan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dalam mendukung kelestarian hutan di kota Tarakan."* ULIN: Jurnal Hutan Tropis 7, no. 2 (2023): 133.

standar kesejahteraan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan pendekatan AHP/analisis strategi untuk menentukan prioritas intervensi program.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak perhutanan sosial terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama akses mereka terhadap sumber daya hutan dan peluang ekonomi, serta merumuskan strategi prioritas yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Metode yang dipakai adalah survei kuantitatif untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat serta analisis strategis (SWOT dan AHP) untuk menentukan kebijakan prioritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 70,97% masyarakat masih berada pada kategori *belum sejahtera*, sementara hanya 29,03% yang dapat dikategorikan sejahtera. Temuan ini menunjukkan bahwa walaupun akses kelola hutan diperluas melalui perhutanan sosial, perubahan kesejahteraan masyarakat belum optimal**,** dan diperlukan penguatan kelembagaan serta kapasitas SDM pendamping.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sangat kuat, karena sama-sama membahas perhutanan sosial dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat hutan. Perbedaannya, penelitian ini secara kuantitatif mengukur kesejahteraan dan strategi program di Kota Tarakan, sedangkan peneliti akan menggali pengalaman subjektif petani hutan di KTH Sedyo Makmur terhadap dampak sertifikasi kayu rakyat, dengan pendekatan kualitatif dan teori kesejahteraan sosial. Selain itu, penelitian ini tidak secara spesifik mengevaluasi sertifikasi kayu, yang menjadi fokus utama dalam penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Erna Zeni Nur yang berjudul *"*Dampak Sertifikasi Hutan Rakyat Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Hutan Rakyat*."* ini membahas kondisi sosial ekonomi petani hutan yang terlibat dalam program perhutanan sosial[16]. Fokus utama dari penelitian ini adalah melihat bagaimana akses kelola hutan negara memengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial petani sebagai pengelola langsung sumber daya hutan.

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi perubahan pendapatan, pola penghidupan, serta tantangan yang dihadapi petani hutan dalam skema perhutanan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun petani memperoleh akses kelola, kesejahteraan mereka masih tergolong rendah akibat lemahnya posisi tawar, rendahnya nilai tambah hasil hutan, dan keterbatasan jaringan pasar.

Penelitian ini relevan karena menempatkan petani hutan sebagai kelompok rentan dalam pengelolaan hutan negara. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Ema belum membahas peran sertifikasi kayu sebagai intervensi kelembagaan, sementara penelitian yang akan dilakukan secara khusus mengkaji sertifikasi kayu rakyat sebagai strategi peningkatan kesejahteraan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ketiga, Penelitian oleh Mahardika dan Hastuti Sri Muyani yang dipublikasikan dalam Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan ini berjudul *"Analisis Legalitas Perhutanan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan*

[16] Erna Zeni Nur. *"Dampak Sertifikasi Hutan Rakyat Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Hutan Rakyat."* Universitas Gadjah Mada, 2015.

Masyarakat di Kabupaten Asahan"[17]. Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana kerangka legal (Peraturan Menteri LHK No. 83/2016) diterapkan dalam konteks perhutanan sosial untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat di sekitar kawasan hutan. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian *sosio-legal* yang menggabungkan analisis yuridis normatif dan empiris berdasarkan wawancara serta sumber hukum.

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi seberapa efektif legalitas perhutanan sosial dalam membuka akses masyarakat terhadap sumber daya hutan, serta peran regulasi dalam mengatasi ketimpangan pemanfaatan sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan dasar hukum perhutanan sosial, masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan di Kabupaten Asahan mendapatkan akses legal untuk mengelola sumber daya, yang secara teoritis bertujuan meningkatkan kesejahteraan mereka dan menciptakan praktik pemanfaatan hutan yang lebih adil. Namun, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa realisasi di lapangan masih menghadapi tantangan implementasi hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Relevansi penelitian ini terhadap penelitian yang akan dilaksanakan terletak pada pemahaman tentang landasan hukum perhutanan sosial dan dampaknya

[17] Mahardika, A., & Muyani, H. S.(2021) *"Analisis Legalitas Perhutanan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Asahan''* Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK) 1, no. 1 (2021): 10–18.

terhadap kemakmuran masyarakat. Perbedaannya, penelitian Mahardika dan Muyani fokus pada aspek legal dan implementasi hukum, sementara penelitian yang akan dilakukan akan menggali dampak kelembagaan sertifikasi kayu rakyat terhadap kesejahteraan sosial petani serta pengalaman subjektif mereka, bukan sekadar evaluasi norma hukum.

Keempat, Penelitian berjudul *"Dampak program perhutanan sosial terhadap pertumbuhan usaha dan deforestasi: bukti empiris dari Indonesia"*[18] oleh Mulyana dan Jossy Pranata Moeis dipublikasikan dalam e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan. Penelitian ini melakukan analisis empiris terhadap desa-desa yang menerima perhutanan sosial dibandingkan dengan yang tidak, di berbagai pulau Indonesia (Sumatra, Kalimantan, Sulawesi). Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif mixed method, yakni instrumental variable dan wawancara mendalam untuk menangkap dinamika ekonomi lokal.

Tujuan penelitian ini adalah menilai apakah program perhutanan sosial berdampak pada pertumbuhan usaha desa dan tingkat deforestasi secara empiris. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam jangka pendek program perhutanan sosial belum signifikan meningkatkan pertumbuhan usaha lokal maupun menurunkan deforestasi, yang dipengaruhi oleh keterbatasan lahan, rendahnya modal, integrasi dengan program desa yang belum optimal, serta kapasitas pengelolaan usaha

[18] Mulyana, M., & Moeis, J. P. "*Dampak Program Perhutanan Sosial Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Deforestasi: Bukti Empiris Dari Indonesia*." E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan 11, no. 1 (2022): 1–20.

masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa walaupun perhutanan sosial membuka akses secara formal, dampak ekonomi di tingkat desa masih terbatas akibat kendala struktural.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyana dan Moeis relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena memberikan konteks empiris tentang hasil ekonomi dari program perhutanan sosial di Indonesia, khususnya bahwa perhutanan sosial belum otomatis berdampak terhadap peningkatan kegiatan ekonomi lokal. Perbedaannya adalah bahwa penelitian ini fokus pada hasil indikator makro desa, sementara penelitian yang akan dilaksanakan akan melihat dampak sosial dan ekonomi sertifikasi kayu rakyat pada tingkat mikro komunitas petani serta pengalaman sosial mereka, bukan sekadar statistik agregat.

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Wa Alimuna dan Abditama Srifitriani berjudul *"Peran Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan*"[19] (Studi Kasus Hutan Nanga-Nanga Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara) yang dimuat dalam Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Alam. Fokus penelitian ini adalah kelembagaan kelompok tani hutan sebagai aktor dalam mengelola hutan rakyat dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan anggota kelompok. Metode

[19] Alimuna, W., & Srifitriani, A. "*Peran Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan"* (Studi Kasus Hutan Nanga-Nanga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara).

penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana peran kelembagaan kelompok tani hutan (KTH) dalam pengambilan keputusan terhadap pengelolaan hutan rakyat dan bagaimana peran tersebut berdampak terhadap kesejahteraan sosial anggota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KTH berperan penting dalam memperkuat koordinasi sosial antaranggota, memperluas akses terhadap pelatihan dan pasar, serta memperbaiki mekanisme pembagian hasil hutan. Meski begitu, keterbatasan modal, kurangnya dukungan kelembagaan eksternal, dan minimnya strategi pemasaran masih menjadi tantangan utama.

Penelitian ini relevan karena sama-sama menempatkan kelembagaan lokal (kelompok tani hutan) sebagai aktor penting dalam dinamika kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya, penelitian Wa Alimuna dan Abditama Srifitriani fokus pada struktur kelembagaan kelembagaan KTH dan praktik pengelolaan, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan akan mengevaluasi dampak sertifikasi kayu rakyat sebuah intervensi kelembagaan yang berpotensi memperluas akses ekonomi dan sosial kelompok tani hutan di dalam kerangka perhutanan sosial.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Dinda Maya Safira dan Wiyono berjudul *Penilaian Dampak Sosial Sertifikasi "*Forest Stewardship Council (FSC) pada Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Mitra Koperasi Wana Manunggal Lestari di Kabupaten Gunungkidul" mengkaji dampak sosial penerapan sertifikasi FSC terhadap kelompok tani hutan kemasyarakatan yang menjadi mitra Koperasi Wana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Manunggal Lestari (KWML), yaitu KTHKm Tani Manunggal dan KTHKm Sedyo Makmur. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan mixed methods, dengan pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Analisis penelitian difokuskan pada indikator Social Impact Assessment (SIA) yang meliputi pengetahuan, persepsi, kesadaran, partisipasi, penanganan konflik, kesempatan kerja, peluang usaha, pendapatan, serta kesehatan dan keselamatan kerja petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi FSC memberikan dampak sosial yang positif terhadap petani hutan, ditandai dengan meningkatnya kapasitas petani, partisipasi dalam kelembagaan, peluang usaha, pendapatan, serta penguatan kemitraan antara kelompok tani dan KWML melalui pendampingan, penyediaan bibit, dan pelatihan keterampilan.

Meskipun demikian, penelitian tersebut memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian Dinda Maya Safira dan Wiyono hanya menitikberatkan pada penilaian dampak sosial berdasarkan indikator Social Impact Assessment (SIA) sehingga pembahasannya terbatas pada perubahan sosial yang dialami anggota kelompok tani setelah mengikuti sertifikasi FSC. Penelitian tersebut belum mengkaji bagaimana sertifikasi FSC memengaruhi kesejahteraan petani secara lebih menyeluruh melalui dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling berkaitan. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan pendekatan mixed methods dengan dominasi pengukuran kuantitatif terhadap indikator-indikator sosial.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka analisis Triple Bottom Line untuk melihat dampak sertifikasi kayu rakyat secara lebih komprehensif terhadap peningkatan kesejahteraan petani KTHKm Sedyo Makmur. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi perubahan sosial, tetapi juga menganalisis perubahan pada aspek ekonomi, seperti peningkatan harga jual kayu, perluasan akses pasar, dan kepastian pemasaran melalui KWML, serta aspek lingkungan berupa penerapan pengelolaan hutan lestari, perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi, diversifikasi tanaman, dan mekanisme audit FSC. Dengan demikian, penelitian ini berupaya melengkapi penelitian sebelumnya dengan menghadirkan gambaran yang lebih utuh mengenai dampak sertifikasi FSC terhadap kesejahteraan petani dari perspektif Ilmu Kesejahteraan Sosial, sehingga tidak hanya menilai dampak sosial, tetapi juga menghubungkan perubahan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka analisis yang terpadu.[20]

F. Kerangka Teori

1. Teori Triple Bottom Line

Triple Bottom Line merupakan sebuah kerangka konseptual yang pertama kali diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1997. Elkington mendefinisikan Triple Bottom Line sebagai pendekatan yang mengukur keberhasilan suatu organisasi atau program tidak hanya dari dimensi ekonomi semata, melainkan

[20] Safira, Dinda "*Penilaian Dampak Sosial Sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC) pada Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Mitra Koperasi Wana Manunggal Lestari di Kabupaten Gunungkidul"* (Yogyakarta: Tugas Akhir Program Studi Sarjana Terapan Pengelolaan Hutan, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, 2025)

secara bersamaan juga mempertimbangkan dimensi sosial dan dimensi lingkungan hidup.[21]

Pendekatan *Triple Bottom Line* menekankan bahwa keberhasilan suatu program tidak dapat dinilai hanya dari satu dimensi, melainkan harus dilihat dari keterkaitan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dampak intervensi secara lebih menyeluruh dan kontekstual.

Dalam penelitian ini, *Triple Bottom Line* digunakan sebagai instrumen verifikasi untuk memahami dampak program sertifikasi FSC terhadap kesejahteraan KTHKM Sedyo Makmur. Dimensi sosial (*people*) digunakan untuk menganalisis perubahan keberfungsian sosial, relasi sosial, dan kapasitas kelembagaan kelompok. Dimensi ekonomi (*profit*) digunakan untuk melihat perubahan dalam penghidupan, stabilitas pendapatan, dan posisi tawar kelompok. Sementara itu, dimensi lingkungan (*planet*) digunakan untuk menganalisis keberlanjutan pengelolaan hutan sebagai basis penghidupan masyarakat.

a. Dimensi Profit

Dimensi *profit* idak hanya dipahami sebagai laba akuntansi yang diperoleh organisasi, tetapi sebagai nilai atau manfaat ekonomi nyata yang dihasilkan dan dapat dirasakan oleh masyarakat yang berada dalam lingkungan kegiatan organisasi.[22] Dalam konteks pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dimensi ini

[21] John Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business* (Oxford: Capstone Publishing, 1997), hlm. 72.

[22] *Sustainability Reporting di Indonesia*, bagian "Triple P dan Triple Bottom Line", hlm. 5–6.

berkaitan dengan kemampuan kegiatan pengelolaan hutan dalam memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat yang terlibat. Manfaat ekonomi tersebut tidak hanya dapat dilihat dari peningkatan nilai suatu produk, tetapi juga dari terbukanya peluang pemasaran, meningkatnya akses terhadap pasar, serta kemampuan masyarakat mempertahankan sumber penghidupannya melalui kegiatan yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, dimensi *profit* digunakan untuk membaca hasil analisis mengenai kondisi ekonomi petani setelah mengikuti program sertifikasi FSC. Pembahasan mengenai peningkatan pendapatan, perubahan harga jual kayu, adanya tambahan harga (*premium*), dan perluasan akses pasar menjadi bagian dari hasil penelitian yang kemudian dikaitkan dengan dimensi *profit*. Dengan demikian, dimensi ini membantu menjelaskan sejauh mana sertifikasi FSC memberikan manfaat ekonomi bagi petani KTHKm Sedyo Makmur.

Peningkatan harga jual kayu, misalnya, menunjukkan adanya perubahan nilai ekonomi dari hasil hutan yang dikelola petani. Demikian pula, akses terhadap pasar yang lebih luas dapat memberikan kesempatan kepada petani untuk memperoleh pembeli dengan kondisi transaksi yang lebih menguntungkan. Keberadaan KWML sebagai pihak yang memfasilitasi pemasaran juga menjadi bagian penting dalam menciptakan hubungan antara produk kayu bersertifikat dengan pasar yang lebih luas.

b. Dimensi people

Dimensi *people* menempatkan manusia sebagai bagian penting dalam keberhasilan dan keberlanjutan suatu kegiatan. Dimensi ini menekankan bahwa

suatu program tidak hanya dinilai dari manfaat ekonominya, tetapi juga dari bagaimana program tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat, hubungan sosial, kapasitas masyarakat, kelembagaan, serta kesempatan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.[23]

Dalam konteks pengelolaan hutan oleh masyarakat, dimensi *people* menjadi penting karena keberhasilan pengelolaan hutan sangat bergantung pada kapasitas dan keterlibatan masyarakat sebagai pengelola. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi aktor yang menjalankan berbagai kegiatan pengelolaan, mengikuti aturan, berpartisipasi dalam kelembagaan, serta berhubungan dengan pihak lain dalam proses pengelolaan hutan.

Dalam penelitian ini, dimensi *people* digunakan untuk membaca hasil penelitian yang berkaitan dengan kondisi sosial petani dan kelembagaan KTHKm Sedyo Makmur. Hasil analisis mengenai partisipasi anggota, peningkatan kapasitas, pendampingan, penguatan kelembagaan, serta kesehatan dan keselamatan kerja kemudian ditempatkan dalam dimensi *people*. Dengan demikian, dimensi ini membantu menjelaskan bagaimana program sertifikasi FSC berhubungan dengan masyarakat yang menjadi pelaku utama pengelolaan hutan.

Peningkatan kapasitas menjadi salah satu perubahan yang penting karena proses sertifikasi menuntut anggota dan pengurus memahami berbagai aturan serta menjalankan kegiatan administrasi dan pengelolaan hutan secara lebih tertib. Pendampingan dan pelatihan memberikan ruang bagi anggota untuk meningkatkan

[23] *Sustainability Reporting di Indonesia*, bagian “Triple P dan Triple Bottom Line”, hlm. 3–4.

pengetahuan dan keterampilan, termasuk kemampuan berinteraksi dengan pihak luar seperti pembeli dan auditor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi dapat memberikan dampak pada kapasitas masyarakat, bukan hanya pada produk kayu yang dihasilkan.

c. Dimensi planet

Dimensi *planet* berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan suatu kegiatan. Dalam konteks kehutanan, dimensi ini menjadi sangat penting karena kegiatan ekonomi masyarakat secara langsung bergantung pada keberadaan dan keberlanjutan sumber daya hutan. Pemanfaatan hasil hutan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya tersebut untuk terus memberikan manfaat pada masa yang akan datang.[24]

Dalam penelitian ini, dimensi *planet* digunakan untuk membaca hasil penelitian mengenai pengelolaan dan keberlanjutan hutan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Hasil analisis mengenai penerapan aturan pengelolaan hutan, pemeliharaan tanaman setelah pemanenan, penyulaman, regenerasi, perlindungan sumber air dan kawasan tertentu, diversifikasi tanaman, serta mekanisme pengawasan digunakan sebagai dasar untuk melihat kesesuaian program dengan dimensi lingkungan.

Sertifikasi FSC menuntut adanya pengelolaan hutan yang bertanggung jawab sehingga kegiatan pemanfaatan hasil hutan tidak dilakukan dengan

[24] *Sustainability Reporting di Indonesia*, bagian "Triple P dan Triple Bottom Line", hlm. 2–3.

mengabaikan kelestarian sumber daya. Dalam konteks KTHKm Sedyo Makmur, penerapan rencana tebang, pemeliharaan trubusan, dan penyulaman menunjukkan adanya upaya untuk mempertahankan produktivitas lahan setelah pemanenan. Praktik diversifikasi tanaman juga menunjukkan bahwa pengelolaan hutan tidak hanya diarahkan untuk memperoleh kayu, tetapi dapat dikombinasikan dengan jenis tanaman lain yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pemanfaatan lahan secara berkelanjutan.

Perlindungan lingkungan juga terlihat melalui adanya ketentuan terhadap kawasan atau unsur lingkungan yang memiliki nilai penting. Perlindungan sumber mata air, perhatian terhadap flora dan fauna, serta pembatasan penggunaan bahan tertentu menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan tidak hanya mempertimbangkan hasil produksi, tetapi juga kondisi ekologis kawasan.

2. Teori Tata Kelola Hutan

Tata kelola hutan merupakan seperangkat aturan, institusi, dan proses yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan dalam pengelolaan sumber daya hutan, serta bagaimana hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat dibentuk dalam konteks tersebut.[25] Tata kelola hutan yang baik mengharuskan adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keadilan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hutan,

[25] Purnomo, Herry. 2005. "Mengukur Aliran Informasi dan Tata Kelola Hutan yang Baik: Studi Kasus Gerakan Nasional Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan (GERHAN) di Indonesia." *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 11(2).

sehingga manfaat hutan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.[26]

Dalam kerangka tersebut, delapan prinsip keberhasilan tata kelola sumber daya bersama, di antaranya adalah kejelasan batas pengelolaan, kesesuaian aturan dengan kondisi lokal, partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan, adanya mekanisme pemantauan dan sanksi, serta penyelesaian konflik secara internal.[27] Prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana kelompok tani seperti KTHKM Sedyo Makmur dapat membangun tata kelola yang efektif dalam pengelolaan hutan rakyat secara kolektif dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, Teori Tata Kelola Hutan berfungsi sebagai kerangka indikator operasional utama untuk menganalisis dampak program sertifikasi kayu rakyat pada dimensi kelembagaan kolektif dan pengelolaan sumber daya hutan berorientasi pada unit analisis kelembagaan/kolektif, melengkapi Teori Kesejahteraan Petani yang berorientasi pada unit analisis individu/rumah tangga. teori ini dioperasionalkan ke dalam enam indikator, yaitu:[28]

1. Indikator Kejelasan Batas dan Legalitas Pengelolaan
2. Indikator Kesesuaian Aturan dengan Kondisi Lokal

[26] Ibid

[27] Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.

[28] Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press.

3. Indikator Partisipasi Aktif dalam Pengambilan Keputusan
4. Indikator Pemantauan dan Sanksi
5. Indikator Transparansi, Akuntabilitas, dan Keadilan Distribusi Manfaat
6. Indikator Standar Sosial FSC sebagai Bagian dari Kepatuhan Kelembagaan

3. Teori Kesejahteraan Petani

Penghidupan (*livelihood*) dapat dipahami sebagai keseluruhan sumber daya, aktivitas, serta akses yang dimanfaatkan oleh individu atau rumah tangga untuk mempertahankan kehidupan dan mencapai taraf hidup tertentu. Penghidupan tidak hanya bergantung pada pendapatan, tetapi terbentuk dari berbagai jenis aset yang dimiliki rumah tangga, meliputi aset alam, fisik, manusia, finansial, dan sosial. Pemanfaatan aset tersebut berlangsung melalui berbagai aktivitas penghidupan serta dipengaruhi oleh institusi dan hubungan sosial yang menentukan kemampuan rumah tangga dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.[29]

Dalam konteks rumah tangga petani, kesejahteraan tidak dapat dipahami hanya melalui satu ukuran seperti besarnya pendapatan. Kondisi kesejahteraan merupakan hasil dari interaksi antara aset penghidupan yang dimiliki, kondisi kerentanan yang dihadapi, serta institusi dan hubungan sosial yang memengaruhi kemampuan rumah tangga dalam memanfaatkan sumber daya tersebut. Kondisi kerentanan dapat berupa berbagai perubahan dan tekanan, seperti kecenderungan perubahan ekonomi, guncangan yang terjadi secara tiba-tiba, maupun pola musiman yang dapat memengaruhi kegiatan penghidupan. Interaksi berbagai unsur

[29] Ellis, F. (2000). Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries. Oxford: Oxford University Press.

tersebut kemudian memengaruhi strategi yang dipilih rumah tangga untuk mempertahankan kehidupannya.[30]

Strategi penghidupan merupakan cara yang dilakukan rumah tangga dalam mengombinasikan berbagai aset dan aktivitas untuk memperoleh hasil penghidupan tertentu. Rumah tangga petani pada umumnya tidak hanya bergantung pada satu sumber penghasilan, tetapi dapat menggabungkan berbagai aktivitas sesuai dengan sumber daya dan peluang yang tersedia. Pilihan strategi tersebut menjadi penting terutama ketika rumah tangga menghadapi ketidakpastian dalam kegiatan produksinya. Kemampuan untuk memanfaatkan berbagai aset dan mengakses berbagai peluang dapat membantu rumah tangga mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber penghidupan serta menghadapi risiko yang mungkin muncul.[31]

Hasil penghidupan (*livelihood outcomes*) tidak hanya dilihat dari tingkat pendapatan yang diperoleh, tetapi juga dari tingkat kestabilan pendapatan, tingkat risiko yang dihadapi, pengaruh faktor musiman terhadap penghidupan, serta keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi dasar kegiatan penghidupan. Dengan demikian, kesejahteraan rumah tangga petani memiliki dimensi yang luas karena mencakup kondisi ekonomi sekaligus kemampuan rumah tangga dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[30] Ibid.

[31] Ellis, F "The Determinants of Rural Livelihood Diversification in Developing Countries," *Journal of Agricultural Economics* 51, no. 2 (2000): 289–302

mempertahankan sumber penghidupan dan menghadapi berbagai risiko yang dapat memengaruhi kehidupannya.[4]

Pendekatan ini juga membantu menjelaskan bahwa dampak program sertifikasi FSC terhadap kesejahteraan petani tidak hanya dapat dilihat dari perubahan pendapatan. Perubahan akses terhadap pasar, kemampuan memanfaatkan sumber daya, kapasitas petani, hubungan kelembagaan, serta keberlanjutan sumber daya hutan juga menjadi bagian yang berkaitan dengan kondisi penghidupan petani. Oleh karena itu, pendekatan penghidupan digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar untuk memahami kesejahteraan petani secara lebih menyeluruh dan kontekstual.

Dalam penelitian ini, Teori Kesejahteraan Petani berfungsi sebagai kerangka indikator operasional utama untuk menganalisis dampak program sertifikasi kayu rakyat pada dimensi yang dirasakan secara individual oleh rumah tangga anggota KTHKm Sedyo Makmur berorientasi pada unit analisis individu/rumah tangga, berbeda dengan Teori Tata Kelola Hutan yang berorientasi pada unit analisis kelembagaan/kolektif. teori ini dioperasionalkan ke dalam enam indikator yang akan dianalisis, yaitu:

1. **Indikator Pendapatan: Indeks Harga yang Diterima Petani**

Indeks Harga yang Diterima Petani merupakan indeks yang menunjukkan perubahan rata-rata harga komoditas pertanian yang dijual oleh petani pada periode tertentu dibandingkan dengan periode dasar. Indeks ini menggambarkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi yang diterima petani.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

peningkatan harga hasil produksi petani dapat menjadi salah satu indikasi membaiknya sisi penerimaan ekonomi petani, meskipun peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan tetap harus dilihat bersama dengan perubahan biaya yang harus dibayar petani.[32]

2. Indikator Biaya: Indeks Harga yang Dibayar Petani

Indeks Harga yang Dibayar Petani merupakan indeks yang menunjukkan perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang harus dibayar oleh petani, baik untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun untuk kebutuhan produksi pertanian. Dalam perspektif kesejahteraan petani, perubahan harga yang dibayar Petani penting diperhatikan karena peningkatan biaya produksi dan konsumsi dapat mengurangi kemampuan daya beli petani apabila tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan dari hasil produksi. Dengan demikian, biaya yang dibayar petani menjadi bagian penting dalam melihat perubahan daya tukar dan kondisi kesejahteraan ekonomi petani.[33]

3. Indikator Pemerataan Manfaat

Pemerataan distribusi manfaat merupakan aspek yang penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat karena peningkatan manfaat ekonomi belum secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh anggota masyarakat memperoleh manfaat secara adil. Dalam konteks pengelolaan

[32] Badan Pusat Statistik, "Detail Metadata Kegiatan Statistik: Indeks Harga yang Diterima Petani (It)," *SIRUSA BPS*

[33] Badan Pusat Statistik, "Detail Metadata Kegiatan Statistik: Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)," *SIRUSA BPS*

hutan masyarakat, pemerataan manfaat dapat dilihat melalui bagaimana manfaat ekonomi dan sosial dari suatu program didistribusikan kepada anggota kelompok, termasuk kesempatan mempero leh akses terhadap sumber daya, informasi, pasar, dan hasil kegiatan kehutanan.[34]

4. Indikator Partisipasi Sosial dan Peningkatan Kapasitas

Partisipasi sosial dan peningkatan kapasitas merupakan aspek penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan. Kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat tidak hanya ditentukan oleh manfaat ekonomi, tetapi juga oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan, serta kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang menjadi sumber penghidupannya. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat menempatkan tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pengelolaan hutan, termasuk dalam perencanaan, implementasi, dan pembagian manfaat.[35]

5. Indikator Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan aspek penting dalam keberlanjutan kehidupan dan pekerjaan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kehutanan. Pekerjaan kehutanan memiliki berbagai risiko terhadap keselamatan dan

[34] Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, *Analisis Kesejahteraan Petani Tahun 2024* (Jakarta: Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian, 2024)

[35] Food and Agriculture Organization of the United Nations, "Community-based Forestry," *FAO Sustainable Forest Management Toolbox*

kesehatan pekerja sehingga pengelolaan kegiatan kehutanan perlu memperhatikan pencegahan kecelakaan kerja, bahaya kesehatan, kompetensi pekerja, penyediaan informasi dan pelatihan, penggunaan alat pelindung diri, serta perlindungan tenaga kerja. International Labour Organization (ILO) menempatkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, kompetensi, informasi dan pelatihan, penggunaan alat pelindung diri, kesejahteraan, bahaya kesehatan, dan perlindungan tenaga kerja sebagai bagian penting dalam keselamatan dan kesehatan kerja pada sektor kehutanan.[36]

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui eksplorasi pengalaman dan perspektif subjek penelitian dalam konteks kehidupan nyata.[37] Peneliti memilih metode ini dikarenakan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan peningkatan kesejahteraan petani KTHKM Sedyo Makmur melalui program sertifikasi FSC oleh Koperasi Wana Manunggal berdasarkan aspek ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[36] *International Labour Organization*, *Safety and Health in Forestry Work: ILO Code of Practice*, Revised Edition (Geneva: International Labour Office, 2025).

[37] Sugiyono, Metode penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm 209

2. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*), yaitu suatu strategi penelitian yang berupaya memahami secara mendalam suatu kasus atau fenomena tertentu dalam konteks kehidupan nyata. Desain ini dipilih karena penelitian berfokus pada satu kasus spesifik, yaitu KTHKM Sedyo Makmur sebagai kelompok pengelola hutan yang mengikuti program sertifikasi FSC yang difasilitasi oleh Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML), sehingga memungkinkan penggalian data secara komprehensif dan kontekstual dari berbagai sumber untuk memahami dampaknya terhadap kesejahteraan anggota kelompok.

3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian merupakan individu-individu yang terlibat langsung dalam konteks penelitian dan berperan sebagai sumber dalam memperoleh informasi[38]. Dalam penelitian ini, pemilihan subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan topik penelitian.

Data hasil penelitian ini diperoleh dari enam informan dengan tiga kategori yang mewakili posisi berbeda dalam rantai kelembagaan pengelolaan hutan dan sertifikasi kayu, yaitu: Ketua KTHKm Sedyo Makmur, Wakil Ketua KTHKm

[38] Mochamad Nasrullah, Okvi Maharani, Abdul Rohman, Eni Fajriyatul Fahyuni, Nurdyansyah, Rahmania Sri Untari, "METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)", cetakan 1 (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2023). Hlm. 20

Sedyo Makmur, anggota KTHKm Sedyo Makmur, Manajer Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML), dan pendamping lapangan dalam program sertifikasi. Ketiga posisi ini dipilih secara purposive untuk memperoleh gambaran yang saling melengkapi: perspektif pengurus kelompok tani di tingkat tapak, perspektif anggota sebagai penerima manfaat langsung, dan perspektif koperasi sebagai fasilitator dan pemegang sertifikat FSC di tingkat kelembagaan yang lebih tinggi.

4. Objek Penelitian

Objek penelitian atau yang juga disebut variabel penelitian, merupakan sesuatu yang menjadi perhatian peneliti[39]. Dalam penelitian ini, objek penelitian adalah peningkatan kesejahteraan petani KTHKM Sedyo Makmur melalui program sertifikasi FSC oleh Koperasi Wana Manunggal Lestari yang dikaji berdasarkan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini mencakup tiga cara, yaitu:

a) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek atau fenomena yang diteliti di lapangan.[40] Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi pengelolaan hutan

[39] Rifa'i Abubakar, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", cetakan 1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Suna Kalijaga, 2021). Hlm. 55

[40] Rifa'i Abubakar, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", cetakan 1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Suna Kalijaga, 2021). Hlm. 90

rakyat, aktivitas kelompok, serta dinamika sosial yang terjadi di lingkungan KTHKM Sedyo Makmur sebagai dampak dari program sertifikasi FSC.

b) Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan subjek penelitian untuk menggali informasi secara lebih rinci dan mendalam.[41] Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pengurus dan anggota KTHKM Sedyo Makmur, pengurus Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML), serta pendamping lapangan guna memperoleh informasi mengenai pengalaman, perspektif, dan dampak yang dirasakan secara langsung terkait pelaksanaan program sertifikasi FSC.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus penelitian.[42] Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen sertifikasi kayu, laporan kegiatan kelompok, data penjualan kayu, serta dokumen kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan program perhutanan sosial dan sertifikasi FSC yang difasilitasi oleh KWML.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri dan menata secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan hasil observasi,

[41]Rifa'i Abubakar, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", cetakan 1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Suna Kalijaga, 2021). Hlm. 67

[42]Rifa'i Abubakar, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", cetakan 1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Suna Kalijaga, 2021). Hlm. 68

wawancara, dan dokumen bahan pendukung penelitian. Proses analisis ini menjadi pedoman bagi peneliti dalam menyusun laporan hasil penelitian. Adapun tahapan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan-catatan tertulis di lapangan[43]. Peneliti akan melakukan reduksi data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dikumpulkan, kemudian mengelompokkan data tersebut dalam tema penelitian berdasarkan teori yang telah ditetapkan.

b) Penyajian data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis sehingga memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan[44]. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk deskriptif naratif, dengan menguraikan data dan temuan yang diperoleh selama proses penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[43] M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", cetakan 2 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014). Hlm. 307

[44] M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", cetakan 2 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014). Hlm. 308

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara sistematis berdasarkan data-data hasil penelitian yang telah direduksi dan disajikan mengenai Peningkatan kesejahteraan petani KTHKM Sedyo Makmur.

7. Teknik Validasi Data

Dalam mengukur tingkat validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam menguji konsistensi data melalui berbagai metode pengumpulan data yang digunakan. Adapun teknik triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Triangulasi Sumber

Pengujian kredibilitas data menggunakan triangulasi sumber dilakukan dengan cara memeriksa satu jenis data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada[45]. Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa informan yang telah dipilih menggunakan teknik *purposive sampling.*

8. Penggunaan AI *(Artificial Inteligence)* dalam Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI), sebagai alat bantu dalam mendukung proses penulisan dan pengolahan informasi. Pemanfaatan Al dilakukan secara terbatas, seperti membantu menyusun struktur penulisan, memperbaiki tata bahasa, merumuskan kalimat agar lebih sistematis. Penggunaan AI tidak digunakan untuk menghasilkan

[45] Rifa'i Abubakar, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", cetakan 1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Suna Kalijaga, 2021). Hlm.131

data penelitian, melakukan analisis secara mandiri, maupun menarik kesimpulan penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang akan dilakukan terbagi dalam empat bab pembahasan. BAB I merupakan pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan gambaran umum yang berisi tentang deskripsi mengenai profil dan kondisi umum lokasi penelitian, meliputi gambaran umum KTHKM Sedyo Makmur sebagai kelompok pengelola hutan rakyat, profil Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML) sebagai fasilitator program sertifikasi, serta gambaran umum pelaksanaan program sertifikasi FSC yang menjadi fokus penelitian.

BAB III merupakan hasil dan pembahasan yang memuat hasil penelitian dan analisis mendalam mengenai peningkatan kesejahteraan petani melalui program sertifikasi FSC oleh KWML terhadap peningkatan kesejahteraan KTHKM Sedyo Makmur, yang dianalisis berdasarkan tiga dimensi *Triple Bottom Line*, yaitu dimensi ekonomi (*profit*), dimensi sosial (*people*), dan dimensi lingkungan (*planet*).

BAB IV adalah penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil analisis data, serta saran yang ditujukan kepada KTHKM Sedyo Makmur, Koperasi Wana Manunggal Lestari, dan peneliti selanjutnya sebagai rekomendasi untuk pengembangan program dan penelitian lebih lanjut. Pada bagian akhir, dicantumkan lampiran

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penelitian yang meliputi dokumentasi dalam bentuk foto, arsip, daftar pustaka, dan lampiran dokumen penelitian lainnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab IV
Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peningkatan kesejahteraan petani KTHKm Sedyo Makmur melalui program sertifikasi FSC oleh Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML), dapat disimpulkan bahwa program sertifikasi FSC memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani melalui keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka Triple Bottom Line.

Pada dimensi ekonomi (*Profit*), program sertifikasi FSC memberikan perubahan pada nilai ekonomi hasil hutan melalui peningkatan harga jual kayu sekitar 10 persen secara umum serta adanya insentif premium sekitar Rp50.000–Rp100.000 per meter kubik dibandingkan kayu nonsertifikasi pada kondisi tertentu. Sertifikasi juga memperluas akses pasar hingga pasar internasional dan memperkuat posisi tawar petani. Dari sisi biaya, biaya sertifikasi ditanggung oleh KWML sehingga tidak secara langsung menjadi beban tambahan bagi petani, meskipun petani tetap memiliki kewajiban ekonomi seperti PSDH. Berdasarkan Teori Kesejahteraan Petani, kondisi tersebut menunjukkan perbaikan pada komponen harga yang diterima petani dan relatif terkendalinya komponen biaya. Namun, penelitian ini belum melakukan penghitungan NTP secara kuantitatif sehingga perubahan kesejahteraan ekonomi tersebut masih bersifat indikatif berdasarkan temuan kualitatif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pada dimensi sosial (*People*), program sertifikasi FSC berkontribusi terhadap penguatan kelembagaan KTHKm Sedyo Makmur melalui pertemuan rutin, pendampingan, pelatihan, serta peningkatan kapasitas anggota. Program juga memberikan ruang bagi anggota untuk berpartisipasi dalam pembahasan pengelolaan hutan dan meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan pihak eksternal seperti pembeli dan auditor. Standar sosial FSC juga mencakup kesehatan dan keselamatan kerja serta larangan penggunaan tenaga kerja di bawah umur. Akan tetapi, bukti mengenai penerapan standar K3 dalam penelitian ini masih lebih banyak berasal dari keterangan pihak manajerial KWML dan belum seluruhnya dikonfirmasi oleh informan petani, sehingga aspek tersebut masih memerlukan penguatan bukti. Selain itu, partisipasi formal melalui kehadiran dalam pertemuan belum sepenuhnya menunjukkan partisipasi substantif yang setara karena terdapat perbedaan pendidikan dan pengalaman antaranggota.

Pada dimensi lingkungan (*Planet*), program sertifikasi FSC menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan pengelolaan hutan yang lebih tertib dan berkelanjutan. Hal tersebut terlihat dari pemeliharaan trubusan setelah pemanenan, penyulaman tanaman, diversifikasi tanaman, perlindungan sumber mata air dan kawasan bernilai konservasi, pembatasan penggunaan pestisida keras, serta adanya audit FSC secara berkala. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil hutan tidak hanya diarahkan untuk memperoleh manfaat ekonomi saat ini, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya hutan sebagai sumber penghidupan masyarakat dalam jangka panjang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ditinjau dari tata kelola hutan, KTHKm Sedyo Makmur telah memiliki dasar legalitas pengelolaan, aturan yang menyesuaikan dengan kondisi lokal, mekanisme partisipasi melalui pertemuan rutin, serta sistem pemantauan melalui aturan kelompok, pendampingan, pencatatan, dan audit. Pendamping lapangan juga berperan sebagai penghubung antara kelompok tani, KWML, dan lembaga sertifikasi. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa belum meratanya pemahaman anggota dan adanya indikasi kesenjangan informasi harga antaranggota. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola masih diperlukan, terutama dalam aspek transparansi informasi dan pemerataan manfaat.

Secara keseluruhan, program sertifikasi FSC yang difasilitasi KWML memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani KTHKm Sedyo Makmur melalui manfaat ekonomi, penguatan kapasitas dan kelembagaan sosial, serta pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan. Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh anggota karena dipengaruhi oleh kondisi produksi, waktu panen, kondisi lahan, kewajiban ekonomi, serta kapasitas masing-masing petani. Oleh karena itu, keberhasilan program lebih tepat dipahami sebagai proses peningkatan kesejahteraan yang berlangsung secara bertahap dan multidimensional.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan sejumlah saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap keberlanjutan program sertifikasi FSC, agar peningkatan

kesejahteraan petani bisa terus diperhatikan dan ditingkatkan. Berikut saran dari peneliti:

1. Koperasi Wana Manunggal Lestari Sebagai lembaga yang memfasilitasi sertifikasi dan menjembatani akses pasar, disarankan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan diversifikasi sumber pendapatan KWML sendiri, mengingat keberlanjutan manfaat program bagi seluruh kelompok mitra sangat bergantung pada eksistensi dan stabilitas finansial koperasi sebagai *offtaker* tunggal. Serta membuat standar model pendampingan bertahap (sosialisasi–administrasi–pelatihan teknis–persiapan audit) yang telah terbukti efektif pada KTHKm Sedyo Makmur sebagai pedoman baku bagi pendampingan kelompok-kelompok mitra lain yang jumlahnya mencapai puluhan kelompok.
2. Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Sebagai kelompok tani penerima manfaat langsung program, KTHKm Sedyo Makmur disarankan untuk Mendorong regenerasi kepemimpinan dan partisipasi aktif dari anggota generasi muda, mengingat penelitian ini menemukan rentang usia anggota yang cukup lebar dengan sebagian pengurus kunci telah berusia lanjut, sehingga keberlanjutan kelembagaan jangka panjang perlu dipersiapkan sejak dini serta Mengoptimalkan pemanfaatan forum pertemuan rutin bulanan tidak hanya untuk pembahasan administratif, tetapi juga sebagai sarana edukasi keuangan sederhana bagi anggota, agar mereka memahami secara utuh komponen pendapatan bersih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bagi masyarakat, khususnya anggota kelompok tani hutan dan masyarakat sekitar kawasan HKm, diharapkan memiliki ekspektasi yang realistis terhadap manfaat ekonomi sertifikasi, dengan memahami bahwa manfaat tersebut bersifat bertahap dan terkait erat dengan siklus panen masing-masing, bukan lonjakan pendapatan instan begitu bergabung dengan skema sertifikasi dan turut menjaga dan mengawasi kepatuhan terhadap aturan pengelolaan hutan lestari secara mandiri di tingkat lahan masing-masing, sebagai bentuk tanggung jawab kolektif menjaga keberlanjutan sertifikasi kelompok, bukan semata mengandalkan pengawasan dari pengurus atau pendamping
4. Bagi pemerintah, khususnya instansi terkait seperti Dinas Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan pemerintah daerah, peneliti memberi saran untuk Memfasilitasi pengembangan basis data dan sistem informasi pasar kayu bersertifikat yang dapat diakses kelompok tani secara langsung, guna mengurangi kesenjangan informasi harga yang ditemukan dalam penelitian ini dan memperkuat posisi tawar petani secara lebih independen dari perantara.
5. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji topik serupa, disarankan untuk melakukan penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP) secara kuantitatif dengan data time-series harga yang diterima dan dibayar petani, guna memverifikasi secara statistik klaim perbaikan kesejahteraan ekonomi yang dalam penelitian ini masih bersifat indikatif berdasarkan data kualitatif semata serta melibatkan lebih banyak informan dari kalangan anggota biasa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan dari sisi pekerja lapangan langsung, guna memperkaya triangulasi data serta mengonfirmasi implementasi standar sosial FSC (jaminan kesehatan, K3, larangan pekerja anak) dari perspektif penerima manfaat langsung, bukan hanya perspektif manajerial.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Pustaka

Arprasetyo Seto Taufik Akbar, *Dampak Sosial Sertifikasi Hutan Rakyat di Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul* (Yogyakarta: Tugas Akhir Program Diploma III Pengelolaan Hutan, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, 2017).

Ahmad Maryudi, dkk., "Perubahan Kelembagaan dalam Meningkatkan Tata Kelola Hutan yang Baik," *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 18, no. 3 (2012): 145.

Alimuna, Wa, dan Abditama Srifitriani. "Peran Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus Hutan Nanga-Nanga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara)." Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Alam.

Badan Pusat Statistik, "Detail Metadata Kegiatan Statistik: Indeks Harga yang Diterima Petani (It)," *SIRUSA BPS*

Badan Pusat Statistik, "Detail Metadata Kegiatan Statistik: Indeks Harga yang Dibayar Petani (ib)," *SIRUSA BPS*

Carunia Mulya Firdausy dan Zainuddin, "Indikator Kesejahteraan Petani melalui Nilai Tukar Petani (NTP) dan Pembiayaan Syariah sebagai Solusi," Economica: Jurnal Ekonomi Islam 9, no. 1 (2018): 131.

Ellis, F. (2000). Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries. Oxford: Oxford University Press.

Food and Agriculture Organization of the United Nations, "Community-based Forestry," *FAO Sustainable Forest Management Toolbox*

Devereux, Stephen. "Livelihood Insecurity and Social Protection: A Re-Emerging Issue in Rural Development." Development Policy Review 19, no. 4 (2001): 507–519.

Elinor Ostrom, Governing the Commons*:* The Evolution of Institutions for Collective Action (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), hlm. 1.

Elkington, John. Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Oxford: Capstone Publishing, 1997.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Forest Stewardship Council, *What is FSC?* (Bonn: Forest Stewardship Council, 2024), https://fsc.org/en/about-us.

International Labour Organization, *Safety and Health in Forestry Work: ILO Code of Practice*, Revised Edition (Geneva: International Labour Office, 2025).

Mahardika, A., dan Hastuti Sri Muyani. "Analisis Legalitas Perhutanan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Asahan." Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) 1, no. 1 (2021): 10–18.

Marita, Nurul Widya, dkk., "Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Indonesia, Review Manajemen Strategis," *AGRIEKONOMIKA: Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian* 10, no. 2 (2021): 214–228,

Maryudi, Ahmad, dan Max Krott. "Forest Certification as a Political Instrument: A Case Study from Indonesia." Forest Policy and Economics 24 (2012).

Maryudi, A., et al. "Shifting Forest Management Paradigms in Indonesia: From State Control to Community-Based Forest Management." Forest Policy and Economics 15 (2012): 63–71.

Midgley, James O. Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare. London: SAGE Publications, 1995.

Mulyana, M., dan Jossy Pranata Moeis. "Dampak Program Perhutanan Sosial Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Deforestasi: Bukti Empiris Dari Indonesia." E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan 11, no. 1 (2022): 1–20.

Nur, Erna Zeni. "Dampak Sertifikasi Hutan Rakyat Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Hutan Rakyat." Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2015.

Nurlita Pertiwi, *Implementasi Sustainable Development di Indonesia* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2021).

Nurrochmat, Dodik Ridho, et al. "The Role of Social Forestry in Poverty Reduction in Indonesia." Forest Policy and Economics 102 (2019): 27–37.

Norman, Wayne, dan Chris MacDonald, "Getting to the Bottom of Triple Bottom Line," *Business Ethics Quarterly* 14, no. 2 (2004): 243–262.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Purnomo, Herry. 2005. "Mengukur Aliran Informasi dan Tata Kelola Hutan yang Baik: Studi Kasus Gerakan Nasional Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan (GERHAN) di Indonesia." *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 11(2).

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, *Analisis Kesejahteraan Petani Tahun 2024* (Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2024), hlm. 12.

Safira, Dinda, *Penilaian Dampak Sosial Sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC) pada Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Mitra Koperasi Wana Manunggal Lestari di Kabupaten Gunungkidul* (Yogyakarta: Tugas Akhir Program Studi Sarjana Terapan Pengelolaan Hutan, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, 2025), hlm. 7-10.

Sachs, Jeffrey D. The Age of Sustainable Development. New York: Columbia University Press, 2015.

Santika, T., et al. "Community Forest Management in Indonesia: Avoided Deforestation in the Context of Anthropogenic and Climate Complexities." Global Environmental Change 46 (2017): 60–71.

Suharto, Edi. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Rafika Aditama, 2009.

Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. Economic Development. Edisi ke-12. Boston: Pearson Education, 2015.

Toha, M., Ake Wihadanto, dan Nurhasanah. "Dampak Perhutanan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan dalam Mendukung Kelestarian Hutan di Kota Tarakan." ULIN: Jurnal Hutan Tropis 7, no. 2 (2023): 133.

Wibowo, A., dan L. Giessen. "Absolute and Relative Power Gains Among State Agencies in Forest Land Use Politics: The Ministry of Forestry and Its Competitors in Indonesia." Land Use Policy 49 (2015): 131–141.

World Commission on Environment and Development. Our Common Future. Oxford: Oxford University Press, 1987.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA